



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2020



PRISMA

APLIKASI PERENCANAAN
STRATEGIS DAN
MANAJEMEN KINERJA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	2
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	5
BAB II Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	6
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	7
Indikator dan Target Kinerja 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	8
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	14
Capaian Kinerja Organisasi	14
BAB IV Penutup	18

Lampiran

- Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

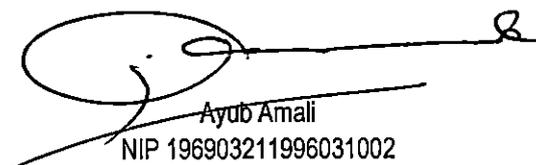
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah pada Tahun 2020 dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan pencapaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kerjanya dalam lingkup Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2020 masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dimohonkan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Semarang, 29 Januari 2021
Kepala Perwakilan,



Ayub Amali
NIP 196903211996031002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana tertuang pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbaharui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja di antaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan. Sedangkan pada lingkungan internal BPK dinyatakan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

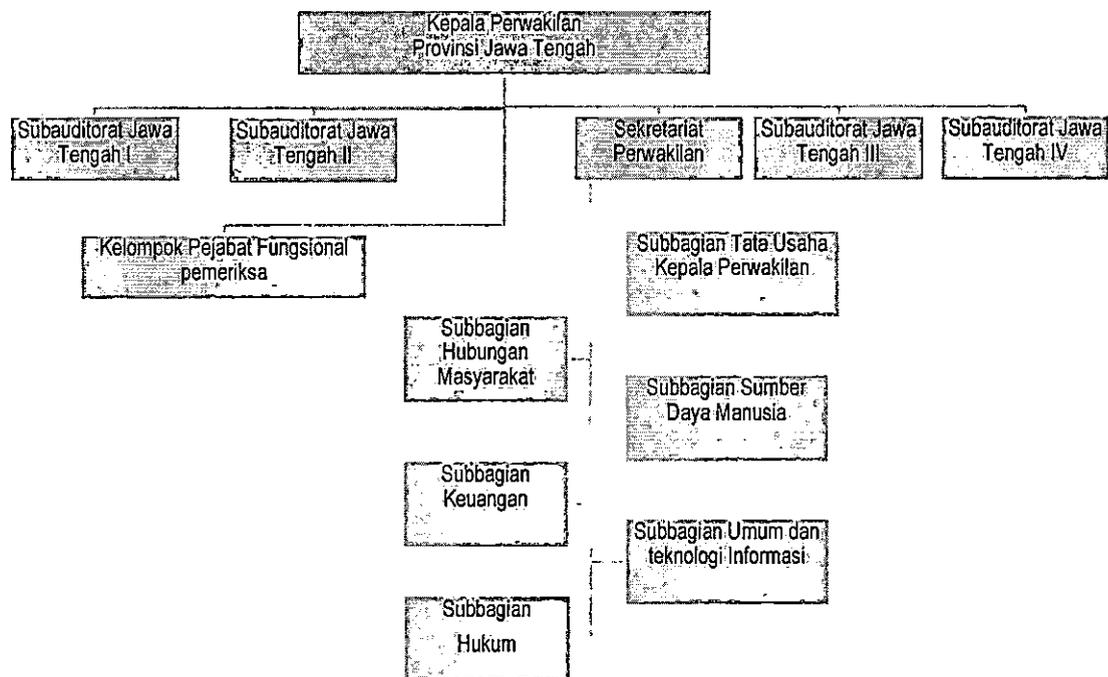
Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KI-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hukum hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Perwakilan dan juga mengoperasikan Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III

1. Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
 - e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
2. Subauditorat Jawa Tengah I mempunyai tugas:
 - a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
3. Subauditorat Jawa Tengah II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
4. Subauditorat Jawa Tengah III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
5. Subauditorat Jawa Tengah IV mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

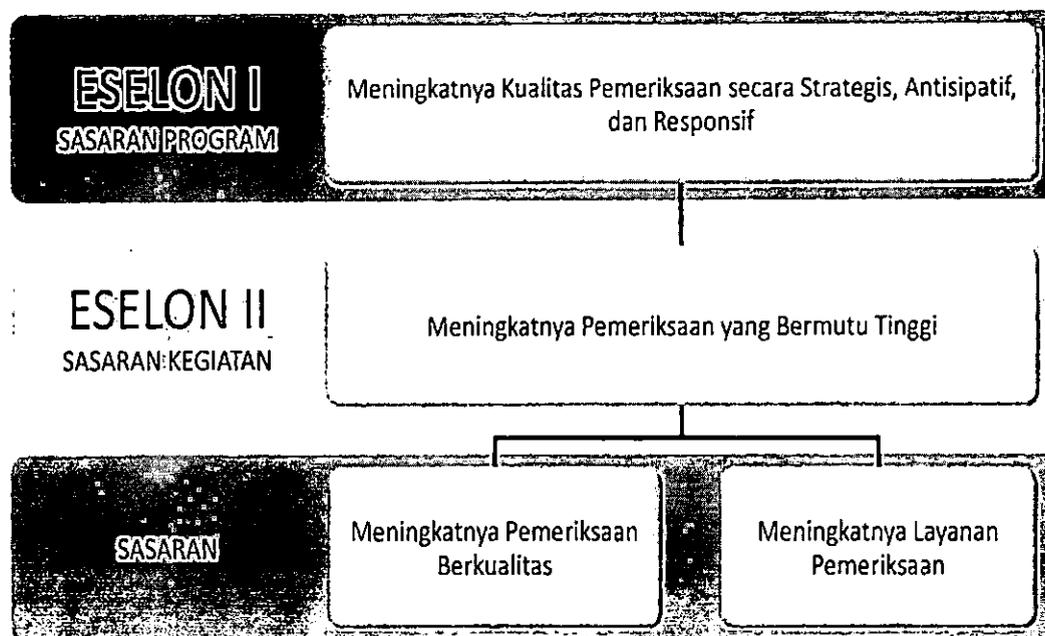
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada akhir bulan Desember 2020 berjumlah 233 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 3 orang Kepala Subauditorat, 6 orang Kepala Subbagian dan 158 orang pejabat fungsional pemeriksa, 64 orang staf penunjang serta 30 orang tenaga kontrak. Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 44.552.729.000,00.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun indikator kinerja dan target kinerja tahun 2020. Indikator kinerja dan target kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V).

Berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 :



INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan , Sasaran dan Anggaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
<p>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas • Meningkatnya layanan pemeriksaan 	Rp44.552.729,00	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

Dari tabel target pencapaian kinerja 2020 diatas dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut :

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Untuk IKU 1, Perwakilan Jawa Tengah menentukan target sebesar 100%.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Pada IKU 2 Perwakilan Jawa Tengah menentukan target sebesar 100%.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pada tahun 2020 Perwakilan Jawa Tengah menentukan target sebesar 75% untuk penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Target IKU 4 pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK, dengan target sebesar 100%.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's, dengan target sebesar 100%.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai Dasar BPK diterapkan dalam organisasi. Pencapaian IKU ini ditargetkan sebesar 5,00.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menargetkan pencapaian IKU ini dengan nilai A.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk IK ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 95%.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. IKU ini memiliki target sebesar 100%.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Pencapaian atas IKU ini ditargetkan sebesar 3,80.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Untuk IKU ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 100%.

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Untuk IKU ini pencapaiannya ditargetkan sebesar 87%.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2020

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	90%	100%	Desember	Triwulan I-IV :
								<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KT, PT dan PJ disetiap penugasan
								<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QA dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Auditorat dan Kepala Perwakilan
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I – IV :
								<ul style="list-style-type: none"> Mereview Harapan Penugasan pada P2
								<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui P2 dan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Mereview Simpulan dalam Konsep LHP
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I:
								<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I
								<ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK Pelaksanaan pembahasan TLRHP Semester I dengan menundang entitas serta pembahasan SIPTL
								Triwulan III:
<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II 								

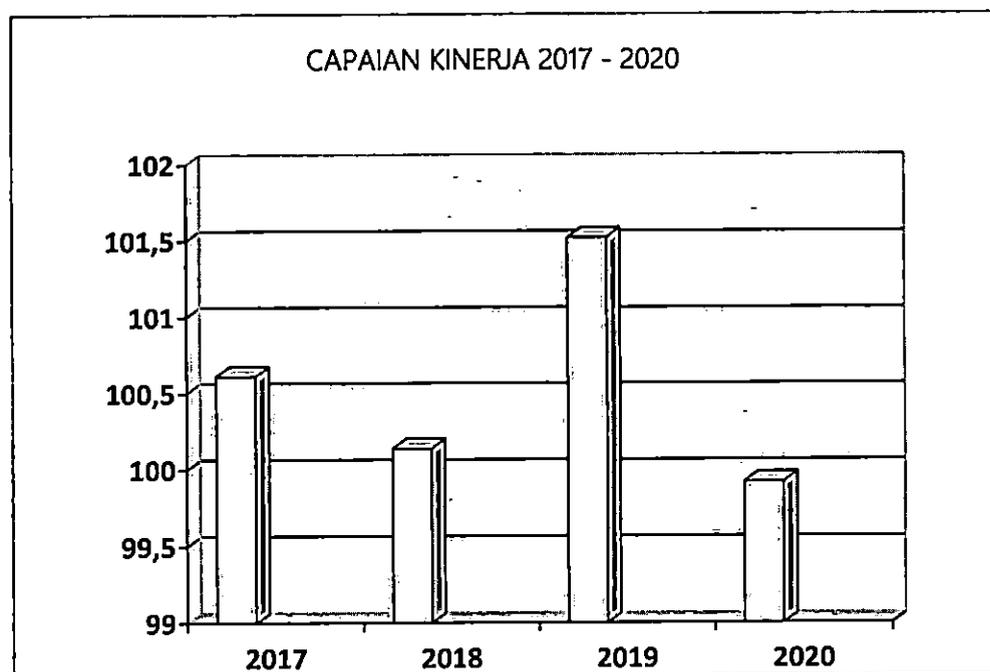
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK Pelaksanaan pembahasan TLRHP Semester II dengan menundang entitas serta pembahasan SIPTL
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I – II :
								Menetapkan tim pemeriksaan tematik nasional
								Triwulan III – IV :
								Melaksanakan pemeriksaan tematik nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I – IV :
								Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan
								Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I – II :
								Merumuskan pemeriksaan tematik lokal yang sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau menjadi tujuan pembangunan daerah
								Menyusun tim Pemeriksaan Tematik Lokal
								Triwulan III – IV :
								Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I – III :
								Sosialisasi atas Visi, Misi dan Nilai Dasar serta Kode Etik dalam Pengarahan Pimpinan maupun rapat - rapat yang dilaksanakan
								Triwulan IV:
								Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi nilai dasar BPK
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	-	-	-	A (86,00)	Desember	Triwulan IV :
								Menyusun Laporan Akuntabilitas Perwakilan Tahun 2020

IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	Triwulan I – IV :
								Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan fungsi dan tugas setiap pegawai baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I – III :
								Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai <i>Best Practice</i>
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,8)	-	-	-	Memuaskan	Desember	Triwulan I :
								Mengirimkan form survey kepuasan kinerja Pemeriksa untuk pemeriksaan LKPD pada semua entitas
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	40%	50%	80%	100%	Desember	Triwulan IV :
								Mengirimkan form survey kepuasan kinerja Pemeriksa untuk pemeriksaan DTT dan Kinerja pada semua entitas
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	Desember	Triwulan I – IV :
								Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun)
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	Desember	Triwulan I – IV :
								Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan realisasi anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target IKU. Skor kinerja Perwakilan Jawa Tengah pada Tahun 2020 sebesar 99,92. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang memperoleh skor sebesar 101,5. Berikut kami sajikan capaian kinerja Perwakilan Jawa Tengah tahun 2017 s/d 2020 :



Capaian kinerja di tahun 2020 secara umum telah melebihi target, meski demikian masih terdapat tiga target IKU yang belum tercapai, antara lain :

- 1) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- 2) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
- 3) IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pencapaian Kinerja Tahun 2020

	Indikator Kinerja IKU		Target	Realisasi	Skor Kinerja
		IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	78,47%
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Sasaran: Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan Meningkatnya	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
	IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,78%	105,00
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,52%	101,52
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,00
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,59)	91,80
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	92,94	105,00
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,18%	104,39
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	150%	105,00
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,94)	103,68
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	97,35%	97,35
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	92,26%	105,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dengan target PK Tahun 2020 sebesar 100% dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV adalah 100%. Realisasi IKU 1 hingga Triwulan IV adalah 78,47%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa LHP LKPD TA 2019 yang tidak memenuhi 100% pada evaluasi LHP oleh EPP.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dengan target PK Tahun 2020 sebesar 100% dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi IKU 2 pada Triwulan IV telah sesuai target yaitu sebesar 100%.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan target target PK Tahun 2020 sebesar 75% dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 75%. Realisasi IKU 3 pada Triwulan IV telah melebihi target yaitu sebesar 85,78%.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dengan target target PK Tahun 2020 sebesar 100% dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi IKU 4 pada Triwulan IV telah melebihi target yaitu sebesar 101,52%.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan dengan target PK Tahun 2020 sebesar 100% dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi IKU 5 pada Triwulan IV telah sesuai target yaitu sebesar 100%.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal dengan target PK Tahun 2020 sebesar 100% dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi IKU 6 pada Triwulan IV telah sesuai target yaitu sebesar 100%.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dengan target PK Tahun 2020 sebesar 5,00 dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 5,00. Realisasi IKU 7 pada Triwulan IV sebesar 4, 59. Atas capaian ini, BPK Perwakilan Jawa Tengah akan berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai dasar dalam budaya kerja.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP dengan target PK Tahun 2020 sebesar 86,00 dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 86,00. Realisasi untuk IKU 8 telah melebihi target yaitu sebesar 92,94.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan target PK Tahun 2020 sebesar 95% dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 95%. Realisasi IKU 9 sebesar 99,18% telah melebihi target.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dengan target PK Tahun 2020 sebesar 100% dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi IKU ini telah melebihi target yaitu sebesar 150%.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dengan target PK Tahun 2020 sebesar 3,80 dengan target berda berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 3,80. Realisasi IKU ini telah melebihi target yaitu sebesar 3,94.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dengan target PK Tahun 2020 sebesar 100% dengan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 100%. Realisasi IKU 12 hingga Triwulan IV sebesar 97,35%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pegawai yang tidak dapat terpenuhi jam diklatnya karena bersamaan dengan penugasan lainnya. Atas capaian ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan di tahun-tahun berikutnya.

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran dengan target PK Tahun 2020 sebesar 87% dengan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan IV sebesar 87%. Realisasi IKU 13 telah melebihi target yaitu sebesar 92,26%

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar **99,92**. Secara umum capaian ini sudah memenuhi target, namun demikian masih terdapat beberapa IKU belum memenuhi target, yaitu: 1) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, 2) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, dan 3) IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

Menindaklanjuti IKU yang masih belum mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hentinya melakukan evaluasi dan perbaikan serta berusaha untuk lebih memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga di periode mendatang pencapaian IKU dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini, dan kami harapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Semarang, 29 Januari 2021

Manajer IKU



Bagus Kurniawan
NIP. 197710131999111001

Mengetahui,
Kepala Perwakilan



Ayub Amali
NIP. 196903211996031002

**SKOR KINERJA APLIKASI PRISMA
TAHUN 2020**

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
↳ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Scorecard	Triwulan...				99.92 ●
↳ Sasaran Kegiatan, Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...				99.92 ●
↳ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemeroiehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	76,47 %	78.47 ●
↳ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75,00%	75,00%	85,78 %	105 ●
↳ IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	101,52 %	101.52 ●
↳ IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5,00	5,00	4,39	91.8 ●
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	86,00	86,00	92,94	105 ●
↳ IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	95,00%	95,00%	99,18 %	104.39 ●
↳ IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	150,00 %	105 ●
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	3,94	103.68 ●
↳ IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	97,35 %	97.35 ●
↳ IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	87,00%	87,00%	92,26 %	105 ●